

INTERVENSI ARAB SAUDI TERHADAP KONFLIK SURIAH TAHUN 2010-2015

LALU DEPIN FITRA WILYADI - 20130510226

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAKSI

Skripsi ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi Intervensi Arab Saudi terhadap konflik di Suriah tahun 2010-2015. Konflik di Suriah berawal dari fenomena “Arab Spring” yang terjadi di kawasan timur-tengah. Masyarakat Suriah yang menuntut pemerintah Bashar Al-Assad untuk turun dari kursi pemerintahan dan menginginkan sistem demokrasi di Suriah. Sehingga konflik antara pemerintahan Bashar Al-Assad dengan pihak oposisi menimbulkan pergejolakan politik dan menimbulkan korban jiwa. Arab Saudi sebagai negara yang memiliki pengaruh serta power di kawasan timur-tengah mengambil peran dalam konflik di Suriah, akan tetapi keterlibatan Arab Saudi pada konflik di Suriah memiliki perbedaan sikap dengan keterlibatan Arab Saudi pada konflik di Negara-negara timur-tengah lainnya. Dalam konflik di Suriah Arab Saudi mendukung pihak Oposisi yang menginginkan Demokrasi, sikap ini berbeda dengan sikap Arab Saudi dalam konflik di kawasan timur tengah sebelumnya dimana Arab Saudi lebih mendukung pemerintahan monarki Absolut yang totaliter dan menolak demokrasi. Penulis menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Intervensi Arab Saudi dalam

konflik di Suriah melalui Teori politik Luar Negeri dan konsep kepentingan nasional menurut Jack C Plano dan Roy Olton. Analisis penulis mengarah kepada kepentingan nasional Arab Saudi untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Al-Assad karena perbedaan ideologi Sunni-Syiah dan menghentikan pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah.

Kata Kunci: perasaingan Ideologi, kepentingan nasional, Intervensi.

Latar Belakang

Berbagai negara di Timur Tengah memiliki sistem politik yang beraneka ragam, seperti monarkhi dan republik. Monarkhi sendiri memiliki berbagai variasi, yaitu absolut dan konstitusional. Arab Saudi merupakan negara yang menggunakan sistem monarkhi absolut. Hukum yang digunakan adalah hukum Syariat Islam yang berdasar pada pengamalan ajaran Islam sesuai dengan pemahaman kaum Wahhabi terhadap Al Qur'an dan Hadits. Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Sa'ud atau dikenal dengan sebutan Ibnu Sa'ud memproklamkan berdirinya Kerajaan Arab Saudi dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd, Ha-a, Asir, dan Hijaz pada 23 September 1932. Kemudian Abdul Aziz menjadi raja pertama dalam kerajaan tersebut. Nama Saudi berasal dari nama keluarga Raja Abdul Aziz as-Sa'ud.¹

Pada penghujung 2010 hingga 2011, pergolakan politik melanda Timur Tengah yang disebut sebagai “*Arab Spring*” atau disebut juga “*Jasmine Revolution*”. Revolusi ini bertujuan untuk menumbangkan rezim otoriter dan menggantikannya dengan sistem demokrasi.²

¹ Rinaldo. (2017, 2 28). *Raja Salman dan Uniknya Sistem Politik Arab Saudi*. Retrieved from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/news/read/2871335/raja-salman-dan-uniknya-sistem-politik-arab-saud>

² Azhari Setiawan, *Diplomatic Dilemma dan Standar Ganda Politik Amerika Serikat Terhadap Konflik Sipil-Militer Mesir Tahun 2013*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.4 Edisi 1/ April 2015, Pusat Studi Masyarakat ASEAN dari Universitas Riau, hal. 67-68.

Dengan semakin meluasnya aksi rakyat di beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang menuntut demokrasi dan pergantian pemerintah, Arab Saudi tidak tinggal diam. Arab Saudi aktif memainkan perannya dalam mengatasi kelompok-kelompok revolusioner tersebut. Suriah merupakan sebuah negara yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara di Jazirah Arab lainnya. Sejak 6 Maret 2011 yang diawali dengan demonstrasi damai, gelombang demonstrasi pro-demokrasi menyebar keseluruh penjuru Suriah terutama di kota Deraa, Suriah.³ Dalam demonstrasi tersebut, rakyat Suriah hanya menuntut pemerintah agar melakukan perbaikan kesejahteraan dan hak-hak politik. Akan tetapi, konflik tersebut kemudian menjadi semakin keruh karena tuntutan rakyat untuk menurunkan Bashar al-Assad dari kekuasaannya.⁴ Dalam perkembangannya pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk menghadang aksi para demonstran yang menimbulkan korban berjatuhan. Tindakan pemerintah yang dinilai melanggar hak asasi manusia tersebut membuat rakyat semakin tidak puas dengan kinerja pemerintah. Warga sipil dan beberapa tentara yang membelot dari pemerintahan berbondong-bondong bersatu dan membentuk unit pertempuran di bawah bendera Tentara Kebebasan Suriah atau *Free Syrian Army* (FSA) Dalam konflik di Suriah, Arab Saudi bukan bertidak menentang kelompok revolusioner seperti yang telah dilakukannya di Tunisia, Mesir, Bahrain, dan Yaman. Pada saat terjadi pergolakan di Suriah antara pemerintah dengan kelompok oposisi yang menuntut demokrasi, Arab Saudi tidak menunjukkan sikap yang sama seperti yang telah dilakukannya di Tunisia, Mesir, Bahrain, dan Yaman. Selama ini Saudi selalu mendukung para diktator negara-negara Timur Tengah dalam menghadapi aksi protes yang dilakukan oleh rakyatnya. Akan tetapi Arab Saudi justru mendukung kelompok revolusioner dan menentang pemerintah Suriah, Bashar al-Assad. Pada saat krisis terjadi Arab Saudi merupakan negara pertama yang merespon dengan agresif peristiwa konflik internal Suriah tersebut. Hal tersebut bermula dengan pernyataan resmi Arab Saudi melalui Raja Abdullah yang menyatakan bahwa pemerintah Suriah sebagai mesin pembunuh dan meminta masyarakat Suriah untuk menentang atas apa yang telah terjadi terhadap korban demonstran, dan dilanjutkan dengan penarikan duta besar Arab Saudi di Suriah Selain itu, Arab Saudi menjadi pelopor dalam memberikan

³ Trias Kuncayono, 2012, *Musim Semi di Suriah: Anak-anak Penyulut Revolusi*, Jakarta, Kompas, hal. 114.

⁴ Hiski Darmayana, *Konflik Suriah Dan Skenario Imperialis Barat*, 13 Juli 2013, diakses dalam Berdikari Online, melalui <http://www.berdikarionline.com/konflik-suriah-dan-intervensi-imperialis-barat/> pada 13 Agustus 2017.

bantuan kemanusiaan kepada para pejuang dan pengungsi Suriah. Pemerintah Arab Saudi juga mengajak negara-negara muslim lainnya untuk mengadakan pertemuan di Mekah, dimana pertemuan tersebut ditujukan untuk memperkuat jaringan anti-Suriah. Peranan aktif Arab Saudi semakin aktif setelah konflik memanas dengan masuknya Hizbullah dan Garda Revolusi Iran di Suriah Agama Islam menurut Karen Armstrong di dalam bukunya yang berjudul “History of Islam” dikatakan bahwa hukum Islam tidak membenarkan perang terhadap negara yang memberikan kebebasan bagi warga muslimnya untuk beribadah, Islam melarang pembakaran, pengrusakan bangunan, dan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak berdosa dalam sebuah kampanye militer. Dengan keadaan yang sekarang bahwa apa yang dilarang oleh Islam justru dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai muslim, dan dengan adanya perbedaan antara Islam Sunni dan Syiah membuat ada hal yang berbeda di dalam persaingan ideologi yang ada saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi relevansi pemakaian Teori politik luar negeri dan kepentingan nasional dalam menjelaskan kasus yang penulis angkat. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen berupa intervensi Arab Saudi terhadap konflik Suriah pada tahun 2010 hingga 2015, sedangkan variabel independennya meliputi faktor kepentingan Arab Saudi di Suriah.

A. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami suatu permasalahan sekaligus menjawab penelitian di atas, memerlukan adanya kerangka berpikir. Kerangka pemikiran itu terdiri dari teori dan konsep. Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi dan berteori adalah mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin

juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.⁵ Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek atau Fenomena.⁶ Kedua hal tersebut yang menjadi acuan dan panduan dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian ini dapat memenuhi prosedur ilmiah. Pada penelitian ini akan menggunakan teori Analisa Teori politik Luar Negeri dan Konsep Kepentingan Nasional.

1. Teori Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri adalah suatu kebijakan Negara, yang bertujuan untuk mencapai tujuan kepentingan nasional dalam batas wilayahnya dan di tetapkan dalam sejumlah keputusan kebijakan politik luar negeri suatu bangsa.

Politik Luar Negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah :

“foreign policy is a strategy or planned course or action developed by the decision makers of a state vis a vis other states or international entities, aimed at achieving specific goals defined in term of national interest.”

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton Politik Luar Negeri adalah kebijakan suatu negara dalam membuat strategi atau rencana yang dikembangkan oleh pengambil keputusan negara terhadap negara lain atau badan internasional, yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang spesifik dan didefinisikan dalam kepentingan nasional.⁷

Politik Luar Negeri bertujuan untuk mencapai keinginan nasional dan memenuhi kebutuhan suatu negara. Politik Luar Negeri merupakan langkah untuk mencapai sebuah tujuan negara dan mempertahankan sekaligus melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

⁵ Mohtar Mas'ood, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta, LP3ES, hal. 218.

⁶ *Ibid*, hal. 109.

⁷ <http://thesis.umsida.ac.id/datapublik/t16855.pdf>, di akses tanggal 29 November 2017

Persaingan ideologi antara islam sunni dengan syiah membuat adanya perbedaan pemahaman dalam masalah aqidah, kaum syiah memiliki pemikiran bahwa tidak di akuinya keberadaan sahabat rasul kecuali Ali bin Abu Tholib dan kaum syiah mengatakan bahwa Ali bin Abu Tholib lebih utama dari pada seluruh sahabat serta lebih berhak memegang kepemimpinan kaum muslim.

Sedangkan kaum islam sunni memiliki pemikiran mengakui bahwa 4 sahabat yaitu Abubakar ash Shiddiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abu Tholib. Kaum sunni sangat menggariskan pokok-pokok keimanan yang tidak boleh di selisih oleh kaum muslim yakni iman kepada Allah s.w.t , malaikat nya, kitab-kitab nya , rasulnya, hari kiamat, serta qadla dan qadar semua tertata sesuai ajaran islam di dalam Al-Qur'an tanpa ada yang di tambah atau dikurangi sedikitpun.:⁸

Arab Saudi sebagai negara yang memiliki pengaruh yang besar di jazirah Arab perlu untuk terus mempertahankan pengaruhnya di kawasan jazirah Arab. Sebagaimana yang terjadi yaitu adanya persaingan antara Arab Saudi dan Iran yang berujung pada terputusnya hubungan kedua negara. Arab Saudi yang selama ini sebagai negara yang dominan di jazirah Arab perlu untuk mempertahankan kawasan Arab dari pengaruh Iran yang semakin lama semakin mengancam.

2. Kepentingan Nasional

Para ahli memiliki definisi yang berbeda dalam mendefinisikan National Interest / Kepentingan Nasional. Hans Morgethau dalam *Politics Among Nations* menyebut kepentingan nasional sebagai suatu Power yang dapat diartikan sebagai pengaruh/kekuasaan/kekuatan. Berbeda dengan Morgenthau, Paul Seabury mendefenisikan kepentingan nasional secara deskriptif dan normatif ; secara

⁸ *Ibid.*

deskriptif kepentingan nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedang secara normatif kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya dengan berhubungan dengan Negara lain.

Konsep Kepentingan nasional (*national interest*) oleh Jack C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum dan merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara untuk mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Dalam konsep kepentingan nasional ini, ada lima kategori umum yang dijadikan sasaran yang hendak dituju yaitu : (1) *self preservation*, yaitu hak untuk mempertahankan diri, dimana setiap negara berhak untuk menjaga dirinya dari berbagai kemungkinan ancaman yang akan mengganggu kestabilan negara; (2) *independence*, yang berarti tidak dijajah atau tunduk pada negara lain, setiap negara berhak untuk merdeka dan sudah merupakan hak nya sebagai negara dan juga dimana negara tidak untuk patuh terhadap negara lain; (3) *territorial integrity*, negara berhak untuk menjaga keutuhan wilayah atau teritorial negaranya; (4) *military security*, berarti tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain, dengan kata lain tidak ada ancaman secara militer yang datang dari negara lain; (5) *economic wellbeing*, atau dapat disebut kesejahteraan ekonomi, sektor ekonomi harus selalu dijamin kesetabilannya oleh pemerintah agar tercipta kesejahteraan di negara tersebut. Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik, ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Suatu negara dituntut untuk

mensejahterakan seluruh warga negaranya serta menyediakan seluruh kebutuhan yang mendukung terciptanya kesejahteraan. Oleh karena itu, salah satu aspek dalam konsep kepentingan nasional untuk mewujudkan suatu kesejahteraan yaitu aspek keamanan.

Kepentingan nasional Arab Saudi di kawasan jazirah Arab yaitu mempertahankan dominasi dan kekuatan untuk menjaga keamanan kawasan serta mempertahankan kekuatan islam sunni di timur tengah khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya. Persaingan antara kedua negara membuat Arab Saudi semakin gencar bertindak guna mewujudkan kepentingan nasionalnya.

A. Letak Geografis Arab Saudi dan Sejarah berdirinya Arab Saudi

Negara Arab Saudi mempunyai akses langsung dan berbatasan langsung dengan Yordania, Kuwait, Teluk Persia, Irak, Laut Merah, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Ini menjadikan Arab Saudi terletak pada kawasan yang strategis.

Abdul Aziz bin Abdurahman Al'Saud adalah orang yang pertama kali memproklamkan Kerajaan Arab Saudi dan sekaligus menjadi Raja pertama bagi Arab Saudi, dan nama Arab Saudi berasal dari nama Raja Abdul Aziz Al' Saud. Arab Saudi pertama kali di proklamirkan pada tanggal 23 September 1932, dengan menggabungkan wilayah Najd, Ha-a, Riyadh, Asir dan Hijaz.⁹

Arab Saudi memiliki Ibu Kota yang bernama Riyadh, kepadatan penduduk Arab Saudi mencapai sekitar 12,3/Km², dan Arab Saudi memiliki jumlah penduduk sekitar

⁹ Muhammad Fajar. IDENTIFIKASI NEGARA ARAB SAUDI DALAM STUDI AGAMA DAN DEMOKRASI. Dalam https://www.academia.edu/16897395/Arab_Saudi, diakses tanggal 23 november 2017

30.770.375 pada Tahun 2014 lalu. Arab Saudi memiliki mata uang Riyal Saudi Arabia (SAR).

Seperti yang diketahui bahwa setiap negara memiliki keterkaitan dengan Agama dan Arab Saudi di kenal sangat erat sebagai Negara Islam. Sejarah berdirinya, dimana Agama Islam muncul pertama kali di Madinah dan Makkah. Secara historis Arab Saudi memiliki ketergelapan moral pada saat Islam belum tumbuh di negara tersebut, banyaknya aksi saling membunuh, perebutan wilayah, perebutan kekuasaan menjadi hal yang sering di jumpai di setiap sudut kota Arab Saudi serta adanya perbedaan moral yang berkembang disana, sehingga pada suatu masa Nabi Muhammad SAW datang untuk menegakkan pandangan serta menyatukan seluruh ummat yang ada di Arab Saudi. Nabi Muhammad SAW turun sebagai penegak ummat serta membawa Al Qur'an yang dijadikan pedoman sehingga ummat yang ada di Arab Saudi memiliki pedoman dan moral yang berbudi pekerti. Sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW yang meneruskan perjuangannya adalah para sahabat, yang dimana para sahabat tersebut adalah Umar bin al-Khattab, Umar bin al-Afwan, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib dengan Al Qur'an sebagai dasar dan pedoman.

Seperti yang diketahui bahwa Arab Saudi identik dengan Negara Islam yang memiliki kekuatan Al Qur'an sebagai pedoman mereka, selain itu Arab Saudi memiliki As Sunnah sebagai dasar Negara dan Syari'ah sebagai hukum pengatur, maka dari itu Arab Saudi sangat erat dengan Negara yang Religius.

Arab Saudi memiliki sistem pemerintahan Monarki Absolut karena dipimpin oleh Raja. Raja Arab Saudi mempunyai peran ganda yaitu menjadi kepala Negara; perdana menteri; panglima angkatan perang; penjaga dua tempat suci; dan memberhentikan Dewan menteri serta mengangkat Dewan menteri. Hukum Arab Saudi tidak mengenal adanya kepartaian dan pemilihan, demokrasi bagi seluruh rakyat Arab Saudi yang ada hanyalah musyawarah.

B. Peran Arab Saudi di kawasan Jazirah Arab

Arab Saudi mempunyai wilayah dominan di kawasan Jazirah Arab, hal yang membuktikan bahwa Arab Saudi mempunyai kawasan yang membentang dari kawasan Teluk Persia hingga Laut Merah, dengan wilayah yang strategis dan di perkuat sumber minyak bumi sebagai sumber perekonomian Negara tersebut. Selain itu Arab Saudi juga sering di sebut sebagai kiblat muslim di seluruh penjuru Dunia dikarenakan 2 lokasi suci di dalamnya, yaitu Makkah dan Madinah, setiap tahunnya selalu menjadi tempat umat Islam menunaikan Haji. Hal ini membuktikan bahwa Arab Saudi menjadi tempat kumpulnya umat Islam diseluruh penjuru Dunia.¹⁰

Oleh karna itu, yang membuat Arab Saudi juga menjadi peranan yang penting bagi kawasan Jazirah Arab. Adanya tempat suci di Negara tersebut, sebagai Ummat Islam mempunyai hukum wajib untuk menunaikan Haji yang sudah tertera di rukun Islam itu.

Selain itu, adanya potensi lain yang ada di Arab Saudi membuat Arab Saudi disegani. Potensi tersebut yaitu karena adanya sumber minyak Bumi terbesar di Dunia yang bertempat di Negara tersebut. Hal ini menyebabkan Arab Saudi disegani oleh masyarakat Internasional. Kawasan timur tengah adalah kawasan yang strategis untuk melangsungkan perekonomian dan perdagangan, kawasan timur tengah adalah kawasan yang strategis, selain itu timur tengah juga merupakan gudang minyak bagi kebutuhan dunia Internasional. Arab Saudi sebagai aktor penting dalam perdagangan minyak

¹⁰ Nugroho, MF. Jurnal "Dinamika Politik Dalam dan Luar Negeri Arab Saudi". Dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7797/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

internasional karena memiliki sumber minyak bumi, dan jalur perdagangan laut yang strategis bagi kawasan timur tengah.¹¹

Jalur laut menjadikan kawasan timur tengah menjadi kawasan yang strategis untuk menjadi penyambung bagi 3 Benua yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Adanya jalur tersebut menjadikan kawasan timur tengah menjadi kawasan yang memiliki banyak keuntungan bagi negara-negara yang ada di dalam kawasan tersebut. Namun dalam sisi lain, kawasan timur tengah menjadi kawasan yang rawan karena banyaknya negara diluar kawasan tersebut yang menaruh kepentingan di kawasan Timur Tengah.¹²

Melihat kawasan timur tengah yang memiliki banyak potensi minyak bumi dan belum lengkapnya alat yang mereka miliki sebagai pendukung potensi tersebut, membuat Negara-Negara lain menaruh kepentingan untuk mengembangkan Teknologi sebagai pengatur potensi minyak bumi yang ada. Mengingat adanya kekurangan teknologi serta alat untuk mengembangkan potensi yang ada, sehingga untuk menjadikan potensi tersebut menjadi sempurna, Negara-Negara kawasan timur tengah ini membutuhkan Teknologi dari Negara lain untuk mengembangkan potensi Minyak Bumi yang dimiliki.

Melihat adanya peluang di kawasan Timur Tengah, membuat banyak Negara yang menaruh kepentingannya di kawasan tersebut dan seiring berjalannya waktu mulai menimbulkan permasalahan seperti perebutan wilayah. Permasalahan perebutan wilayah tersebut bermunculan baik dari Negara-Negara luar maupun Negara besar yang ada di kawasan tersebut, ini menjadikan kawasan Timur tengah menjadi kawasan yang rentan terhadap konflik, perebutan wilayah, hingga mengakibatkan peperangan sengit yang berkepanjangan untuk memperebutkan potensi energi minyak bumi di kawasan Timur

¹¹ Asrin_Dimas_Trifathullah.Peran_Arab_Saudi_Sebagai_Aktor_Utama_di_Timur_Tengah.Dalam <https://slidedokumen.com/peranan-arab-saudi-sebagai-aktor-utama-di-timur-59fb31761723dd882e7f9c85.html>, di akses tanggal 23 November 2017

¹² *Ibid*, hal 18

tengah. Namun melihat banyaknya Negara besar yang menaruh kepentingan dan merebutkan wilayah yang ada di kawasan timur tengah, yang melibatkan Negara seperti Eropa, Afrika hingga Asia, memberi dampak negatif bagi kesejahteraan kawasan Timur tengah dengan adanya ancaman stabilitas politik dan keamanan Negara.

Adanya masalah ini mulai memunculkan pergejolakan Revolusi yang mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Masalah diperparah oleh gagalnya pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan timur tengah dan membuat adanya masalah baru.

Dalam hal ini perlu adanya persatuan keamanan Negara-Negara yang ada di Timur Tengah untuk menjamin kestabilan kawasan Timur Tengah akibat pengaruh dari Negara-Negara diluar yang mempunyai tujuan sendiri yang dapat mengancam kestabilan kawasan Timur tengah sendiri.

Untuk mencapai tujuan ini perlu adanya Negara yang mempunyai kekuatan diatas rata-rata untuk menjadi *power* dan pengatur bagi kawasan timur tengah serta mempunyai kestabilan Negara dan sebagai pengontrol kawasan timur tengah.

Jika melihat Negara-Negara yang ada di timur tengah, maka yang mendekati kriteria yang mampu mengimbangi dan memiliki kekuatan dan stabilitas Negara adalah Arab Saudi, Arab Saudi adalah Negara yang besar yang mempunyai kestabilan di Negeranya dan memiliki Sumber minyak bumi terbesar atau setara dengan seperempat potensi minyak bumi yang ada di Dunia, hal ini menjadikan Arab Saudi sebagai Negara yang dapat dipercaya sebagai pengontrol minyak bumi dikawasan, dan menjadi pengontrol laju perdagangan minyak, dari mulai menentukan harga, berlanjut menentukan jumlah produksi hingga sampai tahap penjualannya Arab Saudi mempunyai pandangan dan tanggapan bahwa, ketika sebuah Negara memiliki sumber potensi minyak, maka Negara tersebut harus memiliki keamanan dan prosedur. Maka dari itu Arab Saudi mempunyai

keamanan sendiri dan cara tersendiri untuk menjaga potensi minyak yang dimilikinya. Sehingga kekayaannya dapat terjaga dengan baik. Dengan cara menjual hasil potensinya ke Negara-Negara besar seperti Eropa, Amerika, sebagai salah satu cara Arab Saudi untuk berupaya menjaga kestabilan Negaranya. Arab Saudi juga melakukan barter Minyak bumi yang dimilikinya dengan peralatan militer yang canggih yang dimiliki oleh negara lain.

Arab Saudi juga telah menyanggah gelar Petro Dollar dan sebagai pengontrol minyak bumi. Sehingga menjadikan Arab Saudi memiliki senjata politik yang kuat serta diplomasi yang kuat dan sangat efektif sehingga Arab Saudi mempunyai kekuatan dalam kebijakan politik luar negerinya, demi menjaga kestabilan kawasan Arab Saudi sendiri Arab Saudi juga mempunyai cara lain dalam menjaga kestabilan kawasan, dengan cara membangun Bank Sentral, yaitu *Saudi Arabia Monetary Authority (SAMA)*. Bank Sentral tersebut memiliki peran penting untuk menjaga kestabilan moneter Arab Saudi. Namun seiring waktu Bank ini juga telah mempunyai peran ganda menjadi Bank yang dapat mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan asing.

KESIMPULAN

Sebagai akhir dari penulisan skripsi, maka dalam bab v penulis akan membahas tentang kesimpulan dari skripsi ini. Dan dengan berdasarkan hasil penelitian terkait kasus yang di ambil khususnya diambil dari pembuktian Hipotesa pada skripsi ini.

Konflik Suriah berawal dari demonstrasi pada 6 Maret 2011. Awal mula adanya demonstrasi rakyat suriah terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad yang meminta Bashar Al-Assad untuk turun dari pemerintahan. akan tetapi Assad menyikapi permintaan rakyat Suriah ini dengan menurunkan militer. Tuntutan rakyat untuk menurunkan Assad justru berubah menjadi konflik akibat kericuhan yang terjadi antara militer pro Assad dengan

rakyat Suriah dan mengakibatkan banyaknya korban sipil yang berjatuhan. Sehingga rakyat Suriah semakin tidak puas dengan pemerintahan Bashar Al-Assad.

Dengan ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad. Terbentuk kelompok oposisi yang berasal dari sekelompok masyarakat dan tentara yang membelot dan membentuk kelompok yang menamakan dirinya Free Syrian Army atau sering di sebut (FSA).

Kelompok ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Assad yang otoriter dan meminta untuk adanya pergantian sistem pemerintahan yang demokrasi. Akan tetapi konflik menjadi semakin meluas di beberapa kota Suriah.

Arab Saudi sebagai negara besar di kawasan Timur Tengah tidak nyaman dengan melihat situasi ini. Arab Saudi justru mengecam tindakan pemerintahan Bashar Al-Assad dikarenakan banyaknya warga sipil yang menjadi korban. Sehingga Arab Saudi mendorong kelompok oposisi untuk mengecam tindakan pemerintahan Bashar Al-Assad.

Kelompok oposisi ini semakin kuat dengan adanya dukungan dari Arab Saudi. Tidak tanggung-tanggung, dukungan Arab Saudi terhadap kelompok oposisi ini dalam bentuk persenjataan, dalam bentuk alat-alat berat, hingga memberikan dukungan dana untuk oposisi Suriah.

Akan tetapi, Pemerintahan Bashar Al-Assad mendapat dukungan dari Iran yang membuat konflik Suriah semakin berkepanjangan dan tidak berhujung. Sehingga Suriah menjadi zona merah yang rawan konflik, dan menimbulkan pro-kontra dari dunia Internasional.

Dalam konflik ini, terdapat indikasi adanya persaingan Ideologi antara Sunni-Syiah. Mengingat Sunni-Syiah memiliki perbedaan madzhab setelah meninggalnya Rasulullah S.A.W dan perbedaan pandangan kepada para sahabat Rasulullah S.A.W.

Sebagai Negara Islam yang taat. Arab Saudi yang berideologi Sunni sangat tidak nyaman apabila Syiah berkembang. Arab Saudi tidak ingin adanya Ideologi selain Sunni yang berkembang. Maka dari itu Arab Saudi lebih dominan terlibat dan mendukung pihak yang sesama Ideologi Sunni dan menyampingkan Syiah.

Selain itu Arab Saudi sangat berpengaruh di kawasan Timur tengah. Dikarenakan ada dua kota suci di dalamnya, yaitu; Makkah dan Madinah. Hal ini membuat Arab Saudi menjadi negara yang erat dikenal sebagai negara Islam yang taat dan di hargai di kawasan Timur tengah dan menjadi kiblat umat muslim di dunia.

Arab Saudi adalah negara yang menerapkan pemerintahan islam. Dengan menerapkan pokok-pokok Al Qur'an dan Sunnah menjadi dasar negaranya. Sehingga mempertahankan ke islaman adalah tujuan mendasar sistem pemerintahan Arab Saudi.

Sehingga Arab Saudi lebih memilih kelompok oposisi dikarenakan persamaan Ideologi Sunni dan masyarakat Suriah yang berdominan penganut Sunni. Sebaliknya, pemerintahan Bashar Al-Assad dan dengan dukungan Iran yang berideologi Syiah, menambah kuat indikasi konflik Suriah sebagai konflik Ideologi antara Sunni-Syiah.

Keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Suriah menjadi Politik Luar Negeri Arab Saudi dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan Timur tengah. Sehingga Arab Saudi tidak ingin pengaruhnya di kawasan menjadi terancam dengan kehadiran Iran.

Maka, Arab Saudi sebagai negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Timur tengah. Akan melakukan apapun dan bersaing dengan negara manapun demi mempertahankan pengaruhnya dan kestabilan negaranya dari ancaman luar, Serta mempertahankan pengaruh ideologi sunni di Timur tengah.

Oleh sebab itu, Arab Saudi mendukung pihak oposisi sebagai alat pendukung kepentingan nasional Arab Saudi agar dapat berjalan dengan baik dan menjaga pengaruh ideologi Sunni dapat dipertahankan. Demi kestabilan Arab Saudi sendiri.

Akan tetapi Bashar Al-Assad semakin bertambah kuat. Disebabkan adanya Iran sebagai aktor pendukung Assad. Dengan bertambah kuatnya Bashar Al-Assad membuat pasukan oposisi dipaksa mundur karena serangan-serangan pro Assad.

Melihat kondisi ini Arab Saudi meminta bantuan kepada negara-negara jazirah Arab untuk mendukung oposisi. Tidak hanya itu, Arab Saudi menggunakan kebesaran negaranya dengan meminta bantuan Liga Arab untuk melawan Bashar Al-Assad melalui kebijakan-kebijakan luar negeri yang di ambil dalam KTT Liga Arab.

Untuk memperlancar kepentingan Arab Saudi. Arab Saudi melakukan apa saja untuk mendukung oposisi. Dan berjanji akan menambah daya tahan militer kelompok oposisi dengan meminta bantuan terhadap AS untuk menambah persenjataan yang lebih canggih dan Rudal-rudal yang mampu menghancurkan pesawat tempur dan alat-alat berat yang mampu bersaing untuk mempertahankan dan merebut wilayah yang telah di ambil oleh tentara pro pemerintahan Assad.

Melihat kondisi semakin hari semakin memanas ini. Dengan adanya bantuan Iran dan pasukan Hizbullah Lebanon yang menurunkan tentara dan persenjataan untuk mendukung pemerintahan Bashar Al-Assad semakin membuat konflik berkepanjangan.

Begitupun Arab Saudi dengan meminta bantuan AS untuk membantu persenjataan yang lebih canggih untuk mendukung pasukan oposisi di Suriah semakin membuat keadaan justru semakin parah. Sehingga konflik suriah sebagai konflik yang zona merah perang.

Sehingga konflik yang terjadi di Suriah mengakibatkan kerugian besar terhadap Suriah, dengan hancurnya bangunan-bangunan kantor, sekolah, hingga rumah warga menjadi sasaran kerusakan akibat perang yang berkepanjangan di Suriah ini.

Rusaknya bangunan tidak menjadi masalah bagi dunia Internasional. Akan tetapi kerugian yang terbesar adalah saat melihat korban yang berjatuh tidak lagi datang dari para tentara yang berperang, akan tetapi banyaknya korban warga sipil yang berjatuh yang mengakibatkan dunia Internasional bersedih melihat aksi dari para negara-negara besar yang hanya mementingkan kekuasaan dan kepentingannya masing-masing.

Selain menjadi ladang peperangan. Sudut-sudut kota Suriah banyak ditemukan mayat sekaligus menjadikan Suriah sebagai kuburan massal bagi para korban yang terkena efek peperangan dan mengakibatkan banyaknya anak yang tidak memiliki orang tua, orang tua pun banyak yang kehilangan anaknya.

Daftar Pustaka:

Buku

- Jatmika, S. (2000). *AS Penghambat Demokrasi*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- Jatmika, S. (2014). *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*. Yogyakarta: Maharsa.
- Kuncahyono, T. (2012). *Musim Semi di Suriah: Anak-anak Penyulut Revolusi*. Jakarta: Kompas.
- Mas'ood, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Morgenthau, H. J. (1990). *Politics Among Nations*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Plano, Jack C.; Olton, Roy;. (1969). *The International Relations Dictionary*. USA: Holt, Rinehart, and Winston, Inc.
- Silalahi, U. (2007). *Metode Penelitian Sosial, Bandung*. Bandung: Refika Aditama.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *MAKARA Seri SOSIAL HUMANIORA*, 9(2), 57-65.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.

Jurnal

- Ikhsan, F. (2015). Kebijakan Politik Luar Negeri Arab Saudi Terhadap Krisis Syria (2011-2014). *Jom FISIP*, 2(2), 1-13.
- Setiawan, A. (2015). Diplomatic Dilemma dan Standar Ganda Politik Amerika Serikat Terhadap Konflik Sipil-Militer Mesir Tahun 2013. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1), 67-77.

Website

- Almalaika, M. (2015, Juni 10). *Arab Saudi - Antara Modern dan Dogmatis*. Dipetik Agustus 13, 2017, dari Deutsche Welle: <http://www.dw.com/id/arab-saudi-antara-modern-dan-dogmatis/a-17306272>
- Armandhanu, D. (2013, Juni 18). *Saudi Kirim Rudal Anti-jet untuk Pejuang Suriah*. Dipetik Agustus 13, 2017, dari Viva News: <http://www.viva.co.id/berita/dunia/421695-saudi-kirim-rudal-anti-jet-untuk-pejuang-suriah>
- Darmayana, H. (2013, Juli 13). *Konflik Suriah Dan Skenario Imperialis Barat*. Dipetik Agustus 13, 2017, dari Berdikari Online: <http://www.berdikarionline.com/konflik-suriah-dan-intervensi-imperialis-barat/>
- Dua Ribu Tentara Syria Membelot ke Jordania*. (2012, September 25). Diambil kembali dari JPNN: <http://www.jpnn.com/news/dua-ribu-tentara-syria-membelot-ke-jordania>

Moussaoui, E. (2014, Januari 24). *Kepentingan Arab Saudi Dalam Perang Suriah*. Dipetik Agustus 13, 2017, dari Deutsche Welle: <http://www.dw.com/id/kepentingan-arab-saudi-dalam-perang-suriah/a-17385172>